



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI
UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP
BELANJA MODAL
(Studi Kasus Kota / Kabupaten Jawa Timur Tahun 2018)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Oleh :

**ELYSA ANGGUN FRADINI
21601081244**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

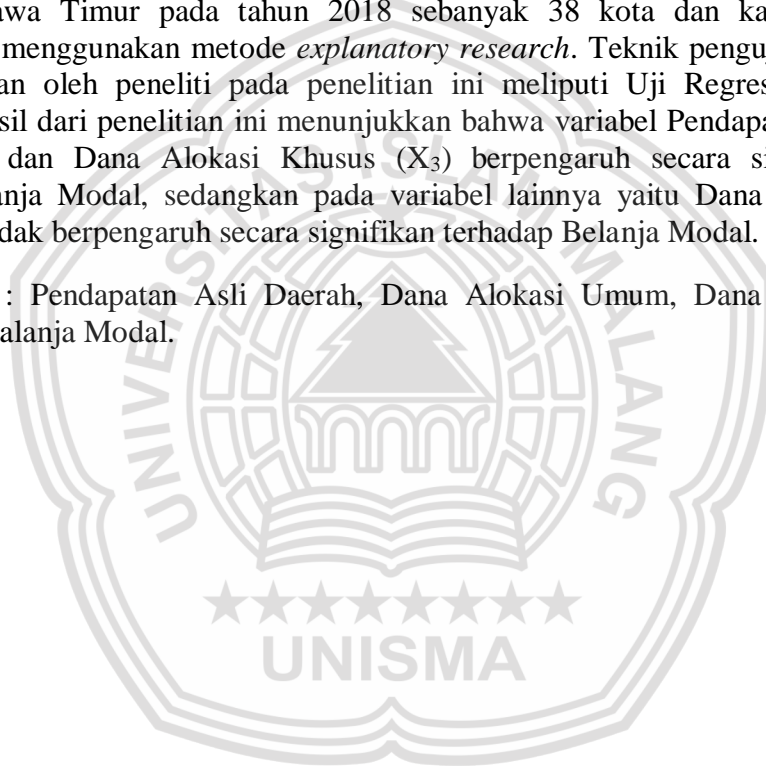
2020



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Belanja Modal (Y). Populasi dan Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik pengumpulan sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, sampel pada penelitian ini yaitu pada Kota dan Kabupaten Jawa Timur pada tahun 2018 sebanyak 38 kota dan kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory research*. Teknik pengujian data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini meliputi Uji Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan pada variabel lainnya yaitu Dana Alokasi Umum (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

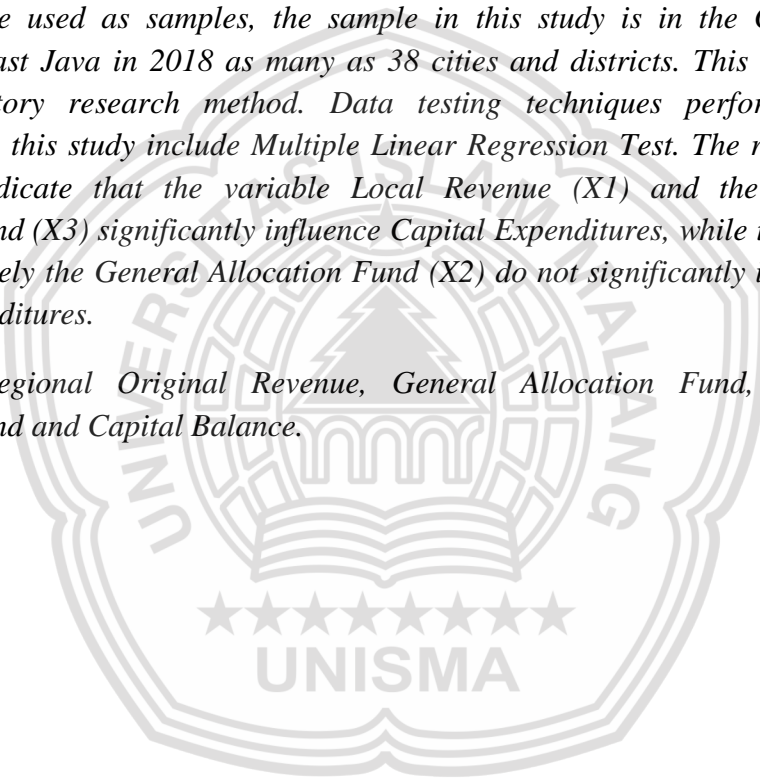
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the influence how the influence of Local Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditures. The variables used are Regional Original Revenue (X1), General Allocation Fund (X2), Special Allocation Fund (X3) and Capital Expenditure (Y). Population and Samples in this study using saturated sampling technique that is a sample collection technique where all members of the population are used as samples, the sample in this study is in the City and Regency of East Java in 2018 as many as 38 cities and districts. This research uses explanatory research method. Data testing techniques performed by researchers in this study include Multiple Linear Regression Test. The results of this study indicate that the variable Local Revenue (X1) and the Special Allocation Fund (X3) significantly influence Capital Expenditures, while the other variables namely the General Allocation Fund (X2) do not significantly influence Capital Expenditures.

Keywords: *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and Capital Balance.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di era reformasi sekarang ini, pembangunan daerah memang diperlukan serta penting adanya untuk melakukan peningkatan pembangunan daerah. Dikarenakan adanya pembangunan daerah tersebut merupakan bagian yang terstruktur dari terwujudnya pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah pada era reformasi ini tidak dapat lepas dari adanya prinsip otonomi daerah. Dengan adanya UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 yang berisi mengenai Pemerintah Daerah dan UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 yang berisi mengenai Perimbangan Keuangan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah ini didukung dengan adanya kedua UU tersebut. Kedua UU pendukung pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan pengganti dari UU Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Pemerintah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perundang – undangan mengenai otonomi daerah di Indonesia yang terakhir di bahas yaitu pada UU Republik Indonesia no.23 Tahun 2014 yang merupakan revisi atau pembaharuan dari beberapa pasal dari UU Republik Indonesia no.32 Tahun 2004. Otonomi Daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, dengan mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensif terhadap suatu kebutuhan, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah. Sebuah proses yang sarat dengan

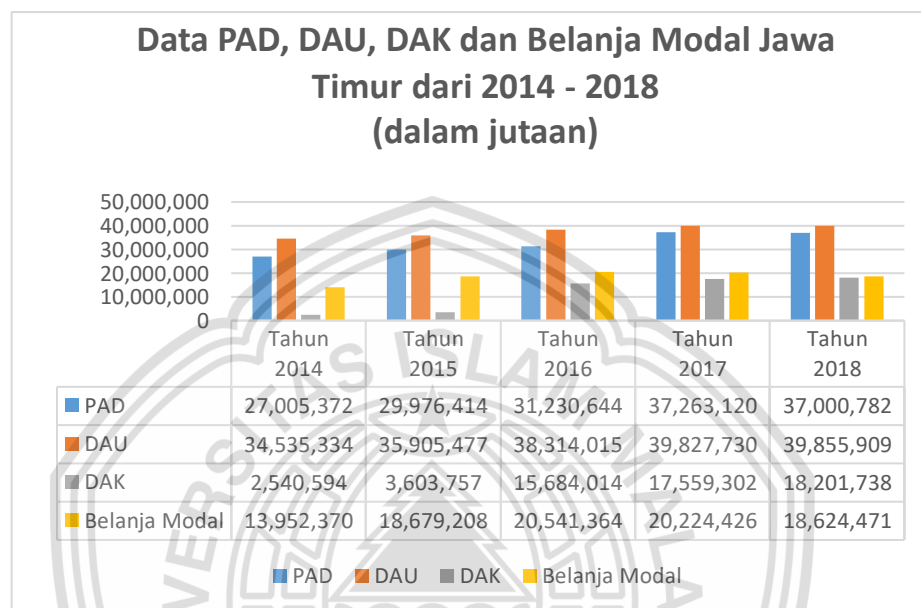
kepentingan adalah pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran Belanja Modal. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana umum untuk disediakan oleh pemerintah.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa yang menjadi sumber – sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah – daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain itu juga terdapat sumber dana lain yaitu yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas publik. Ulum (2008:251) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara meningkatkan

sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Gambar 1.1 Grafik PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal



Sumber : Badan Penelitian Statistik (BPS)

Dilihat dari grafik diatas yaitu pada tahun 2014 - 2015 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan (27,005,372 menjadi 29,976,414), tahun 2015 - 2016 (29,976,414 menjadi 31,230,644) dan pada tahun 2017 - 2018 mengalami penurunan (37,263,120 menjadi 37,000,782) diikuti dengan meningkatkan Belanja Modal pada tahun 2014 - 2015 (13,952,370 menjadi 18,679,208), pada tahun 2015 - 2016 (18,679,208 menjadi 20,541,364) dan pada tahun 2017 - 2018 mengalami penurunan (20,224,426 menjadi 18,624,471). Pada tahun 2016 - 2017 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan (21,230,644 menjadi 37,263,120) akan tetapi Belanja Modal mengalami penurunan (20,541,364 menjadi 20,224,426). Hal ini tidak sejalan

dengan teori Halim (2014) “desentralisasi untuk daerah dalam merancang dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, potensi sumber pendapatan dominan penyumbang Pendapatan Asli Daerah untuk rata-rata pemerintah daerah Indonesia bersumber dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah”. Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal pada tahun 2016 – 2017 mengalami *Inconsistency relation* yang artinya pada saat PAD naik tidak diikuti dengan kenaikan Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum pada tahun 2014 – 2015 dan 2015 2016 mengalami peningkatan (34,535,334 menjadi 35,905,477) dan (35,905,477 menjadi 38,314,015) dan diikuti dengan peningkatan Belanja modal 2014 – 2015 dan 2015 – 2016 (13,952,370 menjadi 18,679,208) dan (18,679,208 menjadi 20,541,364). Sedangkan pada tahun 2016 – 2017 dan 2017 – 2018 Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan (38,314,015 menjadi 39,827,730) dan (39,827,730 menjadi 39,855,909) akan tetapi Belanja Modal pada tahun 2016 -2017 dan 2017 – 2018 mengalami penurunan (20,541,364 menjadi 20,224,426) dan (20,224,426 menjadi 18,624,471).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) “Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah di dalam

penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah “. Dana Alokasi Umum pada tahun 2016 – 2017 dan 2017 – 2018 mengalami *Inconsistency relation* yang artinya pada saat DAU naik tidak diikuti dengan kenaikan Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus pada tahun 2014 – 2015 dan 2015 2016 mengalami peningkatan (2,540,594 menjadi 3,603,757) dan (3,603,757 menjadi 15,684,014) dan diikuti dengan peningkatan Belanja modal 2014 – 2015 dan 2015 – 2016 (13,952,370 menjadi 18,679,208) dan (18,679,208 menjadi 20,541,364). Sedangkan pada tahun 2016 – 2017 dan 2017 – 2018 Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan (15,684,014 menjadi 17,559,302) dan (17,559,302 menjadi 18,201,738) akan tetapi Belanja Modal pada tahun 2016 -2017 dan 2017 – 2018 mengalami penurunan (20,541,364 menjadi 20,224,426) dan (20,224,426 menjadi 18,624,471).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Paramartha dan Budiasih (2016) “Semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui Belanja Modal daerah“. Dana Alokasi Khusus pada tahun 2016 – 2017 dan 2017 – 2018 mengalami *Inconsistency relation* yang artinya pada saat DAK naik tidak diikuti dengan kenaikan Belanja Modal.

Berdasarkan grafik dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dapat mempengaruhi Belanja Modal di Jawa Timur. Pada tahun –

tahun tertentu terdapat *Inconsistency iredation* dikarenakan faktor – faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah sehingga dapat tercipta kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penelitian Adiputra (2014) menyatakan bahwa penerimaan daerah dapat bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain. Dana tersebut merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan.

Dalam penelitian Lailatul (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap meningkatnya Belanja Modal sedangkan dalam penelitian Ikhwan (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dikarenakan tingginya nilai PAD cenderung tidak memiliki Belanja Modal yang besar, hal ini dikarenakan PAD digunakan unruk membiayai belanja lain, seperti belanja rutin/operasional.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran daerah salah satunya ialah Belanja Modal. Adapun tujuan dari transfer salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Umum yaitu untuk mengurangi

perbedaan keuangan dan kemampuan pendanaan antar daerah, dengan cara ini maka pemberian Dana Alokasi Umum antar daerah tidak sama jumlahnya. Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan pemerintahannya, yang berakibat pada terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 adalah dana alokasi umum (DAU). Pengalokasian DAU diserahkan dalam bentuk *block grant*, yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan syarat-syarat tertentu yang mengakibatkan dana tersebut mengalami pemborosan. Pada dasarnya DAU seharusnya dipergunakan untuk belanja modal guna pembangunan daerah, tetapi kenyataannya sebagian besar dana tersebut dipakai oleh pemerintah daerah untuk belanja pegawai yang merupakan komponen belanja langsung.

Menurut penelitian Made dan Ni Putu (2018) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dikarenakan transfer dana dari pemerintah pusat semakin tinggi maka Belanja Modal untuk pembangunan daerah juga semakin baik, sedangkan penelitian Syukri (2019) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

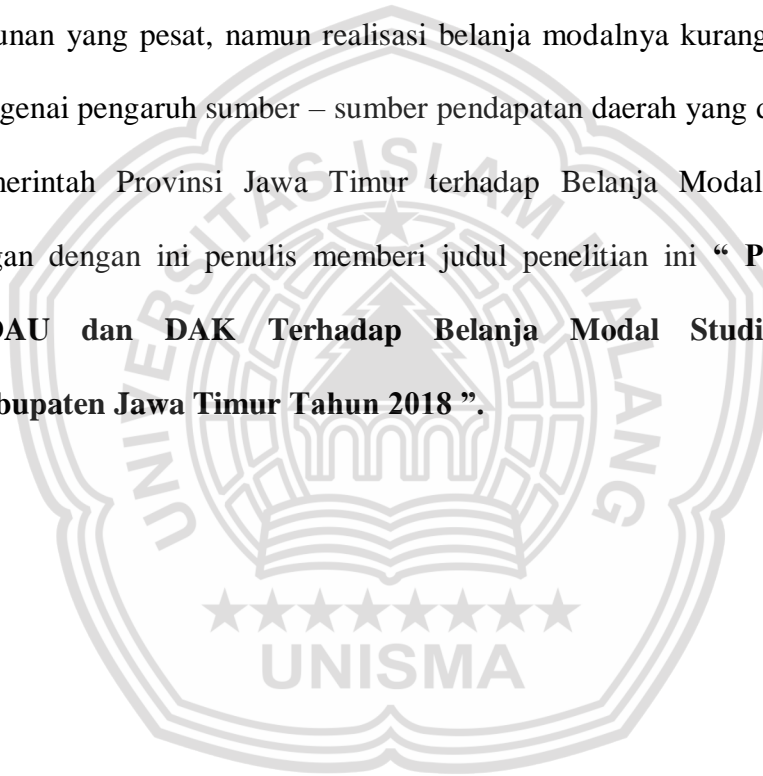
Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk tujuan khusus seperti sarana dan prasarana daerah miskin, area tertinggal, kawasan perbatasan, pengelolaan limbah dan lain – lain. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik. Dana ini adalah dana untuk pemerintah daerah yang sumber penerimannya berasal dari dana APBN yang merupakan dana untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Menurut penelitian Elvia (2019) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal karena semakin tinggi DAK maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang dialokasikan kepada daerah tersebut, sedangkan menurut penelitian Intan, Ratna, Noviansyah (2019) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam kaitannya dengan

peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota / Kabupaten Jawa Timur karena provinsi dengan PAD, DAU dan DAK yang cukup tinggi meskipun terlihat pembangunan yang pesat, namun realisasi belanja modalnya kurang optimal serta mengenai pengaruh sumber – sumber pendapatan daerah yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap Belanja Modal daerah. Sehubungan dengan ini penulis memberi judul penelitian ini “ **Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur Tahun 2018** ”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2018 ?

1.3. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal studi kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal studi kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal studi kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian secara Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian belanja modal yang terdapat dalam APBD.

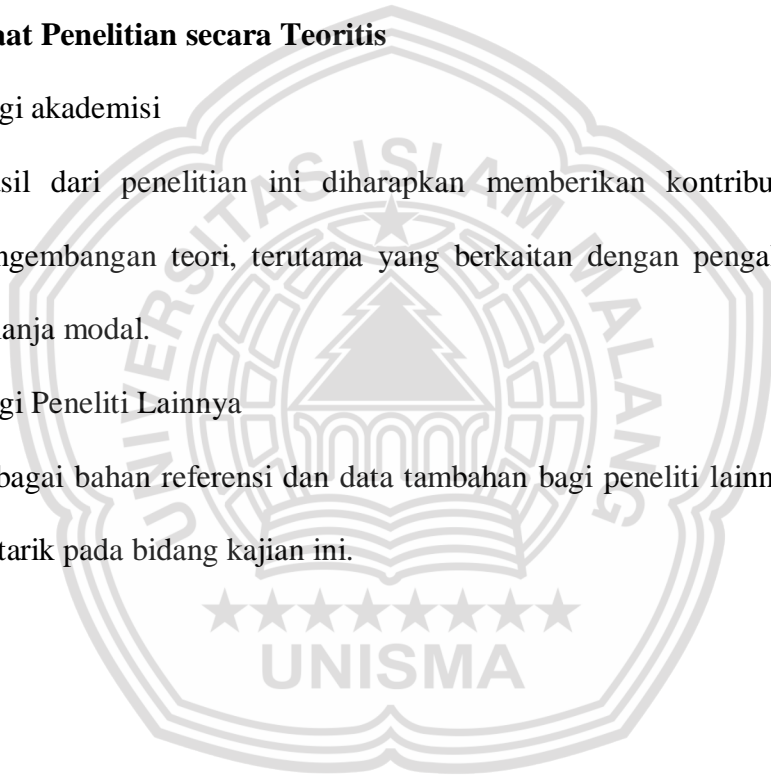
1.4.2. Manfaat Penelitian secara Teoritis

1. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan pengalokasian belanja modal.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal studi kasus Kota dan Kabupaten Jawa Timur tahun 2018 adalah kondisi yang lumayan baik. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh yang sangat tinggi pada PAD dan DAK apabila mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan Belanja Modal, akantetapi pada DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena DAU setiap daerah cenderung kecil dan pengaruhnya terhadap Belanja Modal juga kecil.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh hal berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan dana yang terdapat pada PAD cukup besar hal ini membuat dana yang dialokasikan terhadap Belanja Modal juga semakin tinggi,
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal dikarenakan tujuan utama dari DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi hal ini yang menjadi faktor bahwa DAU tidak hanya digunakan untuk pengalokasikan Belanja Modal akantetapi terdapat faktor lain yaitu

sebagai belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang, belanja subsidi belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal karena nilai transfer dari pemerintah pusat pada kota dan kabupaten di provinsi Jawa Timur cukup besar serta tujuan utama dari Dana Alokasi Khusus adalah untuk pembangunan pelayanan publik sehingga pengalokasian untuk Belanja Modal juga cukup besar.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
2. Peneliti juga meneliti hanya pada provinsi Jawa Timur saja, serta pada tahun 2018 sehingga data yang diperoleh sedikit.

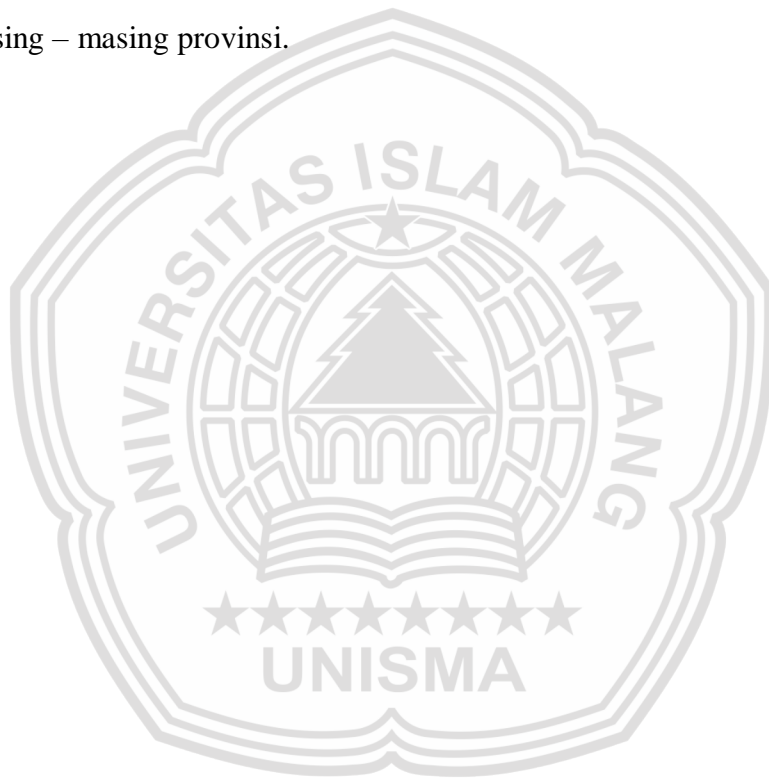
5.3. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya ialah :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel untuk mendiskripsikan Belanja Modal, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal dipengaruhi oleh pendapatan daerah, pendapatan daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sehingga masih banyak faktor (variabel) lain yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan Belanja Modal.

2. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, bagi penelitian lain dapat menggunakan data dari provinsi lain di Indonesia atau menambah tahun sebagai perbandingan atau perbedaan dari setiap masing – masing provinsi.



DAFTAR PUSTAKA.

- Adiputra. 2014. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*. Vol.3 No.2 pp 25-28.
- Dalail, Ahmad. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.
- Damang, 2011. Pendapatan Asli Daerah. Artikel. <http://www-pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>. Mamesa, DJ (1995). *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pustaka , Jakarta
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks.
- Dewi, Puspa Elvia. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2012-2017. *E-Jurnal Akuntansi STIE International Golden Institute Jakarta*.
- Erlis, Nola. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembayaran Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatra. *Jurnal Akuntansi*.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar – dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Jaya, I Putu N.P.K: Dwirandra, A.A.N.B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92.
- Juniawan, Made Ari dan Suryantini, N.P.S. 2018. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *Jurnal Universitas Udayana Bali*

- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2016 *“Perpajakan Edisi Revisi 2016”*. Yogyakarta: Andi.
- Mubasiroh, Lailatul. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Paramartha, Made Fajar dan Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2016. Analysis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 15, hal.1536-1564.
- Permatasari, Isti dan Titik Mildawati. 2016. “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : ISSN : 2460-0585.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005
- Prasetya, Ikhwan. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Purwanto, Fiona Devi. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2011. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rizal, Noviansyah dkk. 2019. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2017. E-Jurnal Akuntansi STIE Widyagama Lumajang.
- Setiawan, Adi. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015 – 2017. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos Statistik Data Analysis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.

Syukri, Muhammad & Didiharyono. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Masagena*, Volume 13, Nomor, 2(1), 525-534

Syukri, Muhammad dan Putri, Hinaya. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Unanda*.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ulum, Ihyaul. 2008 “*Intellectual Capital Performance* Sektor Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 10, No. 2:

www.djp.kemenkeu.go.id

www.bps.go.id

